

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi atas dasar apa pun. Di Indonesia, jaminan terhadap perlindungan HAM telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Meskipun demikian, implementasi perlindungan HAM dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian hukum secara tuntas.

Fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia hingga kini masih menyisakan persoalan besar dalam politik keadilan. kombinasi dari krisis moneter Asia 1997–1998, meningkatnya tekanan dari gerakan reformasi mahasiswa, serta melemahnya legitimasi politik di tengah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi pemicu utama runtuhnya kekuasaan Soeharto (Ramadhani et al., 2025).

Salah satu kasus yang menonjol adalah Tragedi Semanggi I tahun 1998, yang terjadi pada masa transisi politik pasca-lengsernya Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut menandai kegagalan negara dalam melindungi hak hidup warganya, sekaligus menunjukkan problem struktural terkait akuntabilitas aparat dan lemahnya mekanisme penyelesaian hukum. Meskipun reformasi telah bergulir lebih dari dua dekade, negara belum memberikan pengungkapan kebenaran dan keadilan yang memadai, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai impunitas struktural.

Penyintas, keluarga korban, dan publik secara konsisten menuntut negara untuk mengakui pelanggaran HAM dan membuka kembali proses penyelesaian. Salah satu bentuk perjuangan kolektif yang paling konsisten adalah Aksi Kamisan, yakni aksi diam setiap hari Kamis di depan Istana Negara sejak 2007. Aksi ini bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan bagian dari menjaga memori publik tentang tragedi Semanggi I dan kasus-kasus pelanggaran HAM lain yang belum tuntas dan menunjukkan perlawanan dari dominasi negara.

Perjuangan menyuarakan isu hak asasi manusia tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi atau gerakan sosial, tetapi juga berkembang melalui berbagai bentuk budaya populer, salah satunya musik. Dalam kajian komunikasi, musik tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana hiburan, melainkan sebagai media komunikasi yang mampu merepresentasikan realitas sosial, menyampaikan kritik, membangun kesadaran publik, serta memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu peristiwa. Melalui lirik, simbol, metafora, dan narasi yang dibangun, sebuah lagu dapat menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan,

mengkritisi relasi kekuasaan, sekaligus menyuarakan pengalaman kelompok-kelompok yang selama ini kurang memperoleh ruang dalam diskursus publik.

Lirik sebagai sebuah teks tidak pernah berdiri secara netral. Setiap pilihan kata, penyusunan kalimat, maupun simbol yang digunakan oleh pencipta lagu merupakan hasil dari proses pemaknaan terhadap realitas sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, lirik dapat dipahami sebagai bentuk wacana yang memuat ideologi, nilai, kepentingan, serta perspektif tertentu mengenai suatu fenomena sosial. Dalam konteks tersebut, musik memiliki kemampuan untuk membangun empati masyarakat, menghidupkan kembali memori kolektif, sekaligus menjadi media kritik terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan politik.

Fenomena penggunaan musik sebagai media kritik sosial juga terlihat dalam karya-karya sejumlah musisi Indonesia. Salah satu musisi yang secara konsisten menghadirkan isu-isu sosial dalam karya-karyanya adalah Hindia. Melalui lirik yang reflektif dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat, Hindia tidak hanya menyampaikan pengalaman personal, tetapi juga mengangkat berbagai persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan yang berkembang di Indonesia. Salah satu karya yang secara khusus menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia adalah lirik "(Kamis)".

lirik "(Kamis)" merupakan salah satu karya Hindia yang mengangkat narasi mengenai perjuangan keluarga korban pelanggaran HAM berat, khususnya yang berkaitan dengan Tragedi Semanggi I dan semangat perjuangan Aksi Kamisan. Berbeda dengan lirik pada umumnya yang menyampaikan kritik secara implisit

melalui metafora, lirik ini memanfaatkan dokumentasi suara, narasi faktual, serta kesaksian keluarga korban sehingga membangun representasi yang kuat mengenai duka, kehilangan, perjuangan, dan tuntutan atas keadilan. Kehadiran unsur-unsur tersebut menjadikan lirik "(Kamis)" tidak hanya memiliki nilai estetika sebagai karya musik, tetapi juga memiliki nilai sosial sebagai media yang merepresentasikan memori kolektif sekaligus kritik terhadap belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Sebagai sebuah teks budaya, lirik "(Kamis)" menarik untuk dikaji menggunakan Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk. Pendekatan ini memandang bahwa suatu teks tidak hanya dipahami melalui struktur kebahasaannya, tetapi juga melalui proses kognisi sosial yang melatarbelakangi pembentukan teks serta konteks sosial yang memengaruhi kemunculannya. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada makna yang tersurat dalam lirik, melainkan juga berupaya mengungkap bagaimana realitas sosial, ideologi, relasi kekuasaan, dan kepentingan tertentu direpresentasikan melalui konstruksi bahasa yang digunakan dalam lirik tersebut. Pendekatan ini dinilai relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara struktur teks dalam lirik dengan konteks sosial yang melatarbelakangi penciptaannya, sehingga representasi Tragedi Semanggi I dan Aksi Kamisan dalam lirik "(Kamis)" dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Dalam konteks analisis wacana kritis lirik "Kamis" oleh Hindia, Aksi Kamisan menjadi rujukan historis dan sosial yang menegaskan bahwa pesan lirik bukan sekadar ekspresi artistik, tetapi representasi dari jeritan korban yang menuntut keadilan (Putra, 2016). Aksi Kamisan hadir sebagai praktik diskursif

yang menciptakan ruang advokasi, memperjuangkan kebenaran, dan mempertahankan memori publik atas tragedi Semanggi I serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu global yang sering kali diabaikan atau bahkan ditutupi oleh wacana dominan yang dikendalikan oleh pihak berkuasa. Dalam banyak kasus, korban pelanggaran HAM mengalami pembungkaman, baik melalui sensor media, manipulasi informasi, maupun tekanan politik. Namun, di tengah keterbatasan ruang bagi korban untuk bersuara, seni dan budaya, khususnya musik, telah menjadi alat ekspresi yang kuat dalam memperjuangkan keadilan dan mengkritik ketidakadilan sosial.

Tragedi Semanggi I terjadi di masa awal reformasi dan sangat erat kaitannya dengan situasi politik yang masih bergejolak setelah lengsernya Presiden Soeharto. Transisi pemerintahan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan tonggak kepemimpinannya dilanjutkan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J Habibie memicu ketidak puasan publik karena mahasiswa dan Masyarakat menganggap sebagai kelanjutan rezim Orde Baru.

Lagu sebagai bagian dari media komunikasi memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan advokasi dan membangun kesadaran kolektif. Melalui lirik yang sarat makna dan melodi yang emosional, lagu dapat membentuk opini publik, membangkitkan empati, serta menginspirasi gerakan sosial yang mendukung korban pelanggaran HAM. Namun, dalam konteks analisis wacana kritis, lagu sebagai medium perlawanan tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dan kontrol media (Dhesita & Sanjaya, 2024).

Namun, kajian akademik mengenai hubungan antara budaya populer, musik, dan advokasi HAM masih sangat terbatas. Sebagian penelitian berfokus pada Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial (Putra, 2016), sebagian lainnya menyoroti musik sebagai kritik politik secara umum (Dhesita & Sanjaya, 2024). Akan tetapi, belum terdapat penelitian yang mengkaji bagaimana analisis wacana kritis terhadap lirik lagu dapat dipahami dalam kaitannya dengan advokasi HAM dan praktik gerakan sosial, khususnya dalam konteks Tragedi Semanggi I. Padahal, musik sebagai bagian dari budaya populer dapat menjadi medan kontestasi politik yang relevan untuk mempertanyakan, mengkritik, dan mengganggu narasi dominan negara.

Dalam teori Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, wacana dalam media bukan hanya sekadar sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk mempertahankan atau menentang dominasi kekuasaan. Van Dijk menjelaskan bagaimana struktur teks, konteks sosial, serta aspek kognitif masyarakat berinteraksi dalam membentuk makna dan persepsi terhadap suatu isu. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana lagu yang mendukung korban HAM berfungsi sebagai wacana tandingan terhadap narasi dominan yang mencoba menutupi atau membenarkan pelanggaran HAM (Jannah, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana lagu “(Kamis)” membentuk wacana tandingan terhadap narasi negara mengenai pelanggaran HAM, bagaimana struktur teksnya menggambarkan tragedi dan ketidakadilan, serta bagaimana musik tersebut beresonansi dengan pesan dan spirit Aksi Kamisan sebagai gerakan advokasi korban. Pendekatan Analisis Wacana

Kritis (AWK) Teun A. Van Dijk digunakan untuk memeriksa tiga dimensi:

1. Struktur teks (tema, metafora, diksi, representasi aktor)
2. Kognisi sosial (pengetahuan dan ideologi pembuat teks)
3. Konteks sosial (struktur dominasi, relasi kuasa, dan situasi politik terkait HAM).

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memetakan bagaimana budaya populer berkontribusi pada arena politik advokasi HAM serta mereproduksi memori kolektif tentang pelanggaran HAM.

Menurut Van Dijk, wacana tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kognitif yang memengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh masyarakat (Sakka et al., 2023). Dalam konteks lagu bertema HAM, struktur lirik, metafora, serta strategi retorika yang digunakan menjadi bagian dari analisis wacana yang membentuk konstruksi makna. Selain itu, penyebaran lagu melalui berbagai media juga memengaruhi bagaimana lagu tersebut dipahami dan diterima oleh audiens.

Studi yang dilakukan oleh Peddie menunjukkan bahwa musik sering kali digunakan sebagai alat resistensi terhadap ketidakadilan sosial, dan politik. Contoh nyata dapat dilihat dari lagu-lagu protes yang muncul dalam berbagai peristiwa sejarah, seperti lagu-lagu perlawanan terhadap rezim otoriter di Amerika Latin, Afrika Selatan, maupun dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Di Indonesia, lagu-lagu yang mengkritik pelanggaran HAM, seperti karya Iwan Fals, Efek Rumah Kaca, atau Sukatani, sering kali mendapat tekanan dari pihak berwenang, menunjukkan bagaimana wacana dalam musik berinteraksi dengan

kekuatan politik yang dominan.

Konsistensi Hindia dalam mengangkat isu sosial politik juga bukan fenomena baru atau kebetulan satu kali. Sejak awal kariernya baik dalam format band bersama Danilla dan Rara Sekar, maupun sebagai proyek solo, Baskara Putra secara konsisten menghadirkan tema keresahan personal yang bersinggungan dengan persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari kesehatan mental, kritik terhadap budaya kerja, hingga isu lingkungan. Pola ini menunjukkan bahwa lirik (Kamis) bukan penyimpangan tematik dari karya karya sebelumnya, melainkan kelanjutan dari kecenderungan artistik yang sudah terbentuk sejak lama, sekaligus penegasan bahwa musisi populer dapat secara konsisten memposisikan diri sebagai pelaku kritik sosial melalui karya karyanya.

alam kerangka yang lebih luas, Eyerman dan Jamison menegaskan bahwa musik berperan penting sebagai alat mobilisasi tradisi budaya dan pembentuk identitas kolektif dalam gerakan sosial, karena musik mampu menciptakan rasa kebersamaan emosional yang sulit dicapai oleh bentuk komunikasi politik lain seperti pernyataan tertulis atau orasi formal. Dengan demikian, keterlibatan Hindia dalam mengangkat isu Aksi Kamisan melalui lirik (Kamis) dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi musik yang lebih besar sebagai instrumen gerakan sosial, sejalan dengan pola yang telah didokumentasikan dalam berbagai gerakan sosial di berbagai belahan dunia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana lagu-lagu bertema HAM berperan dalam membentuk wacana tandingan terhadap narasi dominan yang mencoba menutupi pelanggaran HAM. Dengan menggunakan

pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk, penelitian ini akan mengkaji bagaimana lirik lagu, konteks sosial, serta respons media dan masyarakat terhadap lagu-lagu bertema HAM terkhusus lagu “Kamis” karya band Hindia dapat memengaruhi kesadaran kolektif.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana relevansi dan representasi wacana kritik sosial dalam lagu “(Kamis)” karya grup musik Hindia terhadap fenomena aksi Kamisan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, ditinjau dari struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, dalam merefleksikan nilai-nilai serta semangat perjuangan menuntut keadilan HAM?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, maka objek kajian wacana terbatas pada lirik lagu “Kamis” karya grup band Hindia tanpa menganalisis keseluruhan album maupun karya musik Hindia lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti yang hendak di capai dan di harapkan mampu mengetahui;

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana kritik sosial dalam lagu (Kamis) karya band Hindia dan kaitannya dengan aksi kamisan serta pelanggaran hukum hak asasi manusia di

Indonesia khususnya tragedi Semanggi 1.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Kontribusi pada pengembangan Analisis Wacana Kritis (AWK) pada medium musik.

1. Penelitian ini menambah khasanah teoritis tentang bagaimana wacana kritik sosial dalam musik dapat dianalisis menggunakan model AWK, khususnya Van Dijk.
2. Memberikan dasar teoretis bagi analisis lirik sebagai produk diskursif yang memuat relasi kuasa dan ideologi.
3. Memperkaya kajian hubungan antara media budaya populer, kekuasaan negara, dan advokasi HAM.
4. Menjelaskan secara konseptual bagaimana lagu dapat berkorelasi dengan gerakan sosial seperti Aksi Kamisan.
5. Menambah literatur di bidang ilmu politik dan studi HAM mengenai peran budaya populer sebagai arena konstruksi wacana kritis.

Kontribusi terhadap studi memori kolektif dan representasi resistensi:

1. Memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana musik merepresentasikan nilai, semangat, dan ingatan kolektif tentang tragedi HAM, khususnya Tragedi Semanggi I.
2. Mengembangkan teori-teori representasi dan counter-discourse dalam konteks advokasi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pada perkembangan ilmu politik khususnya kekuasaan teori gramsci media sebagai pesan atas media massa terkait khususnya teori analisis wacana kritis van Dijk, juga bisa memperluas pemahaman teoritis mengenai bagaimana musik digunakan sebagai medium representasi, resistensi, dan komunikasi sosial atas isu-isu pelanggaran hak asasi manusia.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan strategis untuk para aktivis dalam memperkuat narasi perjuangan HAM, khususnya dalam meneruskan agenda Aksi Kamisan agar tetap relevan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh generasi muda melalui medium budaya populer seperti musik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan lembaga negara yang berwenang untuk lebih responsif, transparan, dan proaktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara tuntas, serta menjadikan perspektif korban sebagai dasar penyusunan kebijakan.

1.6 Fokus Kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana yang terkandung dalam lagu "(Kamis)" dari Grup Musik Hindia, dengan penekanan pada pesan-pesan sosial dan politik yang disampaikan melalui lirik, musik, dan narasi lagu tersebut. Lagu ini dianggap memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena Aksi Kamisan, yang menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini akan menggali bagaimana lirik lagu tersebut membentuk dan merefleksikan kesadaran publik tentang pelanggaran

HAM yang terjadi di masa lalu, serta bagaimana lagu tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengkritik ketidakadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak korban yang sering kali terabaikan oleh negara.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi relevansi antara lagu "(Kamis)" dengan fenomena Aksi Kamisan, yang setiap minggu mengadakan aksi di Jakarta untuk menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM, terutama selama masa Orde Baru. Fokus ini bertujuan untuk menghubungkan wacana dalam lirik dengan aksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta menganalisis bagaimana lagu tersebut dapat memperkuat pesan aksi Kamisan dan memberikan dampak terhadap persepsi publik tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini akan menyoroti hubungan antara seni, musik, dan aktivisme dalam membentuk kesadaran kolektif dan mendukung perjuangan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.